

BAB IV

KESIMPULAN

Penelitian ini telah membuktikan bahwa kasus kerusakan lingkungan di Provinsi Riau memicu pemerintah setempat untuk melakukan kerjasama dengan *World Wildlife Fund for Nature* sebagai bentuk upaya pemerintah untuk menangani masalah lingkungan.

Rusaknya sektor lingkungan hidup di Provinsi Riau dipengaruhi oleh beberapa faktor, pertama faktor ekonomi dimana masyarakat memanfaatkan hutan secara tidak benar guna memenuhi kebutuhan hidup dengan melakukan kegiatan *illegal logging*, pembukaan lahan berbasis bakar dan pertambangan yang dilakukan secara massif dan berkepanjangan. Kedua, faktor kelembaman birokrasi dimana kebijakan pemerintah dalam mengelola lingkungan hidup dianggap tidak efektif. Hal ini dibuktikan dengan masih minimnya penindakan terhadap pelaku perusak hutan hingga ke akar meskipun sudah diterapkan hukum Undang-Undang tentang karhutla dan pembalakan. Kenyataannya Kebijakan pemerintah tentang pencegahan karhutla besandingan dengan kebijakan pembangunan industry perkebunan yang memungkinkan perusahaan/investor untuk melakukan pembakaran dan pembukaan lahan. Selain itu adalah kebijakan pembangunan infrastruktur, dimana banyaknya investor besar masuk ke Indonesia dengan jaminan atas ketersediaan lahan dan peredaman konflik nyatanya berpotensi merampas sumberdaya alam. Ketiga yaitu lemahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian alam menjadi alasan salah satu alasan sulitnya menghentikan laju kerusakan lingkungan di Riau.

Akibat banyaknya aktivitas kejahatan lingkungan di Provinsi Riau memberikan dampak kerugian bagi masyarakat antara lain memicu perubahan iklim yang diakibatkan oleh tingginya degradasi hutan, memicu bencana alam seperti kabut asap, banjir dan tanah longsor, berkurangnya ekosistem hutan . untuk mengendalikan kerusakan lingkungan di Wilayah Riau. Pemerintah pun akhirnya melakukan kerjasama dengan *World Wildlife Fund for Nature*. Kerjasama tersebut berbentuk dalam program-program pengelolaan hutan dan alam dengan menggunakan strategi konservasi.

Penelitian ini mencoba membuktikan bahwa terjadinya kerjasama Pemerintah Daerah Riau dengan WWF dapat terjadi karena didukung oleh adanya faktor demokrasi dan globalisasi di Indonesia. Demokrasi memberikan kesempatan bagi masyarakat termasuk NGO untuk berperan dalam proses pembuatan keputusan, melalui proses pengumpulan aspirasi, protes, kritisi, aksi dan saran. Banyaknya keluhan-keluhan kolektif akan isu lingkungan di Provinsi Riau, dapat memicu tumbuhnya peran WWF dalam penanganan isu terkait. Dalam hal ini, pemerintah memberikan ruang kepada WWF untuk bekerja langsung dari dalam sistem dengan melakukan Kerjasama untuk bersama-sama menangani kasus lingkungan hidup di Provinsi Riau. Adanya factor globalisasi memberikan dampak terhadap kerusakan lingkungan di Provinsi Riau, hal ini dikarenakan Globalisasi selalu berkaitan dengan Pembangunan ekonomi dan fasilitasnya yang berguna untuk menopang kepentingan nasional dan pihak-pihak tertentu dalam ekonomi global yang dalam pemenuhannya justru berbenturan dengan prinsip tata kelola hutan dan lingkungan. Timbulnya indikasi dari persoalan lingkungan seperti perubahan iklim dll, diyakini menjadi ancaman bagi keamanan dan keberlangsungan manusia di seluruh dunia. Kelembaman birokrasi dalam mengelola kasus ini mendorong aktor-aktor luar seperti WWF untuk turut dilibatkan dalam penanganan lingkungan di

Provinsi Riau yang dilakukan melalui strategi konservasi dengan bekerjasama dengan pemerintah local.

Disisi lain, kerjasama lingkungan antara Pemerintah Daerah Provinsi Riau dengan WWF juga terjadi karena adanya keterbatasan yang dimiliki oleh pemerintah setempat. Keterbatasan-keterbatasan tersebut adalah yang pertama, minimnya anggaran sehingga pemerintah tidak dapat bekerja secara mandiri dalam upaya pencegahan kerusakan hutan. Kedua, terbatasnya teknologi yang berguna untuk membantu para petugas melakukan monitoring terhadap segala aktivitas dalam hutan. Ketiga adalah keterbatasan sumber daya khususnya tenaga ahli. Disini ahli lingkungan sangat dibutuhkan dalam upaya pengelolaan kembali lingkungan di Riau untuk membantu pemerintah dalam melakukan penelitian, pemantauan dll. Oleh karena itu, adanya keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh pemerintah membuat kerja mereka dalam menghentikan kerusakan lingkungan terhambat, disisi lain tuntutan masyarakat juga semakin membesar sehingga mendorong pemangku kekuasaan untuk mencari solusi lain, disini Pemerintah Daerah Provinsi memilih kerjasama dengan WWF sebagai solusi dan upaya pengelolaan lingkungan.

Dalam studi ilmu Hubungan Internasional penelitian ini layak dilakukan karena menggunakan teori struktur kesempatan politik dan kerjasama internasional yang sudah umum digunakan dalam Hubungan Internasional. Sifat pemerintah yang demokratis memudahkan masyarakat dan kelompok kepentingan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan. Sesuai dengan teori kesempatan politik bahwasanya adanya kesempatan politik yang terbuka dapat mendorong kelompok-kelompok gerakan social mempergunakannya sebagai sebuah momentum untuk melakukan penekanan untuk mencapai agenda gerakan socialnya.

Selain pemerintah local dalam penelitian ini juga terlibat aktor-aktor lain seperti NGO, para akademisi dan tokoh berpengaruh, serta masyarakat secara keseluruhan. Ini sesuai dengan yang telah dijelaskan dalam konsep kerjasama internasional dimana dalam usaha sebuah Negara untuk menyelesaikan suatu masalah yang bersifat regional maupun internasional bisa diselesaikan bersama dengan kerjasama baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antara sesama kelompok non pemerintah.

Namun dengan beberapa temuan yang ada, penulis menyadari bahwa penelitian yang dilakukan masih memiliki beberapa kelemahan diantaranya adalah kurangnya informasi dan data yang didapatkan terkait efektivitas dari kerjasama Pemerintah Daerah Provinsi Riau dengan *World Wildlife Fund for Nature* dalam program konservasi lingkungan.

Dari seluruh temuan yang telah dijelaskan dalam pembahasan-pembahasan sebelumnya, dapat ditarik dua kesimpulan penelitian. Pertama, merujuk pada teori struktur kesempatan politik bahwasanya kerjasama Pemerintah Daerah Riau dengan WWF dapat berlangsung karena adanya pengaruh dari demokrasi dan globalisasi di Indonesia, yang memudahkan WWF dalam melakukan ekspansi norma-norma lingkungan diberbagai level pemerintah daerah. Kedua, merujuk pada konsep kerjasama internasional, penelitian ini menunjukkan jika Pemerintah Daerah Provinsi Riau tidak bisa menjadi fasilitator tunggal dalam penanganan lingkungan, karena keterbatasan di beberapa aspek anatara lain finansial, teknologi dan sumber daya, sehingga memerlukan bantuan pihak-pihak luar untuk mencapai program dan tujuannya.